

## DIPLOMASI PENDIDIKAN SABAH BRIDGE DALAM MEMENUHI HAK PENDIDIKAN BAGI ANAK PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI SABAH, MALAYSIA

### SABAH BRIDGE EDUCATIONAL DIPLOMACY IN FULFILLING THE RIGHT TO EDUCATION OF CHILDREN OF INDONESIAN MIGRANT WORKERS IN SABAH, MALAYSIA

**Christy Damayanti**

*Program Studi Ilmu Hubungan Internasional  
Universitas Slamet Riyadi Surakarta  
christydamayanti@unisri.ac.id*

**Untari Narulita Madyar Dewi**

*Program Studi Ilmu Hubungan Internasional  
Universitas Slamet Riyadi Surakarta  
untari.narulita.madyar@unisri.ac.id*

**Defta Galuh Permatasari\***

*Program Studi Ilmu Hubungan Internasional  
Universitas Slamet Riyadi Surakarta  
defta.galuh.permatasari@unisri.ac.id*

\* Correspondent author: defta.galuh.permatasari@unisri.ac.id

#### INFO ARTIKEL

##### *Article History*

##### *Received*

*7 February 2023*

##### *Revised*

*21 February 2023*

##### *Accepted*

*25 July 2023*

##### **Keywords:**

*children of Indonesian  
migrant workers,  
education diplomacy;  
Sabah Bridge.*

##### **Kata kunci:**

*anak pekerja migran  
Indonesia; diplomasi  
pendidikan; Sabah  
Bridge.*

##### **Abstract**

*This research was conducted to describe the role of Sabah Bridge in conducting educational diplomacy in fulfilling the educational rights of Indonesian migrant workers' children through educational diplomacy. Qualitative research methods, literature studies, interview techniques, and educational diplomacy theory involving non-government actors were carried out. The results of the study show that there are three results from Sabah Bridge's educational diplomacy with related parties: (1) the Indonesian government built the Kota Kinabalu Indonesian school in Malaysia; (2) immigration cooperation between the two countries to facilitate documents needed by PMI children; and (3) Sabah Bridge and the Government of Indonesia provide repatriation scholarships to continue higher education in Indonesia. This research confirms that through diplomacy non-state actors can contribute to the national interests of their countries.*

##### **Abstrak**

Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan peran Sabah Bridge dalam melakukan diplomasi pendidikan dalam pemenuhan hak pendidikan anak TKI melalui diplomasi pendidikan. Metode penelitian kualitatif, studi literatur, teknik wawancara, dan teori diplomasi pendidikan yang melibatkan aktor non pemerintah dilakukan. Hasil penelitian memperlihatkan terdapat tiga hasil dari diplomasi pendidikan Sabah Bridge dengan pihak-pihak yang terkait: (1) pemerintah Indonesia membangun sekolah Indonesia Kota Kinabalu di Malaysia; (2) kerja sama keimigrasian dua negara untuk memfasilitasi dokumen yang diperlukan anak PMI; dan (3) Sabah Bridge dan Pemerintah Indonesia memberikan beasiswa repatriasi untuk melanjutkan pendidikan tinggi di Indonesia. Penelitian ini mengkonfirmasi bahwa aktor non-negara melalui diplomasi dapat berkontribusi bagi kepentingan nasional negaranya.

## PENDAHULUAN

Diplomasi tidak hanya dilakukan oleh aktor negara, melainkan juga bersama dan oleh aktor negara dalam memenuhi kepentingan nasional. Salah satu kepentingan nasional adalah melindungi dan memenuhi hak warganya yang berada di negara lain. Salah satunya adalah hak anak pekerja migran untuk menempuh pendidikan di tempat orang tuanya bekerja. Dalam pemenuhan hak anak ini, aktor non-negara yang terpanggil dapat membantu untuk mewujudkannya melalui upaya diplomasi pendidikan kepada pihak-pihak yang terkait.

Malaysia merupakan salah satu negara yang diminati oleh pekerja migran Indonesia (PMI) untuk mencari pekerjaan. Kebanyakan dari pekerja migran yang ada di Malaysia bekerja sebagai buruh kelapa sawit yang terdapat di Sabah. Mayoritas dari PMI tersebut berasal dari Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan, dan daerah sekitarnya. Bermula dari orang tua atau seseorang yang bekerja di Sabah, Malaysia kemudian menikah dan memiliki anak di sana. Namun dalam pernikahan tersebut tidak terdaftar pada catatan pemerintahan. Hal ini mengakibatkan dokumen yang mereka miliki tidak lengkap, bahkan anak-anak mereka yang lahir di sana pun tidak memiliki dokumen yang lengkap. Persoalan tersebut

memberi dampak buruk bagi anak-anak mereka untuk mencari pendidikan. Bahkan sebagian kecil dari PMI tersebut tidak memprioritaskan pendidikan anak.

Anak-anak PMI yang berada di perkebunan kelapa sawit di Sabah Malaysia layak untuk mendapatkan hak pendidikan. Namun, hak tersebut terhambat karena anak-anak PMI tersebut tidak memiliki dokumen sehingga sulit untuk mengakses pendidikan di negara Malaysia. Salah satu cara supaya anak-anak PMI tersebut mendapatkan hak pendidikannya, yaitu dengan bersekolah di sekolah swasta. Namun, biaya yang dikeluarkan untuk bersekolah di sekolah swasta sangat banyak, sehingga hal ini membuat para orang tua atau pekerja migran merasa kesulitan (U. N. M. Dewi, 2018).

Pemenuhan hak anak atas pendidikannya bukan hanya tanggungjawab dari negara dan orang tua saja. Sejatinya perusahaan tempat orang tua atau PMI bekerja juga ikut serta dalam pemenuhan hak atas pendidikan anak PMI sesuai dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Seperti halnya perusahaan yang bernama Felda Global Ventures Plantations Malaysia (FGVPM) yang ikut bertanggungjawab atas hak pendidikan yang harus didapatkan oleh anak-anak PMI yang bekerja di perusahaan tersebut. Tujuan dari perusahaan FGVPM ini

untuk memelihara aset yang nantinya anak-anak tersebut dapat menjadi pekerja di perusahaan tersebut. Oleh karena itu, perusahaan memberikan jaminan kesejahteraan bagi keluarga PMI, baik orang tua ataupun anak-anaknya. Dengan memiliki pendidikan yang layak, maka perusahaan secara tidak langsung telah mempunyai aset yang berkualitas, yang dapat memberi dampak positif bagi perusahaan meskipun hal tersebut mengeluarkan biaya yang tinggi (Sholina, 2022).

Dalam menangani persoalan pemenuhan hak pendidikan bagi anak-anak PMI di Sabah Malaysia ini telah hadir Sabah Bridge. Sabah Bridge merupakan suatu yayasan untuk menjadi akses pendidikan bagi anak-anak PMI yang berada di Sabah supaya bisa melanjutkan pendidikannya di Indonesia. Sabah Bridge didirikan pada tahun 2014 oleh seorang aktivis pendidikan atau guru yang berasal dari Indonesia yang pernah menjadi pengajar di Sabah (FT UGM, 2020). Namun peresmiannya baru pada tahun 2020 yang pada akhirnya mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan nama sebagai Yayasan Pendidikan Sabah Bridge (UGM, 2020). Keikutsertaan Sabah Bridge dalam menyediakan akses pendidikan telah

memperoleh beberapa apresiasi dari banyak kalangan dan juga memperoleh penghargaan. Sabah Bridge sendiri juga bisa dikatakan sebagai komunitas dalam mewujudkan hak pendidikan bagi anak-anak PMI.

Terkait dengan fenomena persoalan anak migran Indonesia di Malaysia beberapa penelitian telah membahasnya. Di antaranya, Dendi Tri Suwarno, Suryono Yoyon, dan Zamroni pada tahun 2021 membahas mengenai rasa nasionalisme anak-anak PMI yang telah luntur bahkan identitas sebagai anak bangsa Indonesia telah menghilang. Hilangnya nasionalisme ini karena kurangnya pendidikan yang mereka dapatkan selama tinggal di perkebunan kelapa sawit Malaysia (Suwarno et al., 2021). Untari Narulita Madyar Dewi pada tahun 2018 yang mengangkat isu mengenai akses pendidikan yang masih terbatas di daerah Semenanjung, Malaysia. Kurangnya akses pendidikan di Semenanjung karena *Community Learning Center* (CLC) yang berada di Semenanjung dilarang oleh Kerajaan Malaysia, sementara yang terdapat di Sabah diijinkan oleh Kerajaan Malaysia (U. N. M. Dewi, 2018).

Hak pendidikan wajib dipenuhi tidak saja untuk kepentingan nasional Indonesia melainkan juga merupakan program dari *Sustainable Development Goals* (SDGs)

yang keempat sejak 25 September 2015. Pendidikan untuk menciptakan kualitas sumber daya manusia yang unggul merupakan prasyarat utama mencapai program-program SDGs lainnya dalam membangun global secara berkelanjutan (Safitri et al., 2022). Kehadiran aktor non-negara dalam membantu mewujudkan kepentingan nasional dan global ini perlu mendapatkan perhatian, khususnya dari kalangan akademik studi Hubungan Internasional. Oleh karena itu, untuk mengisi kesenjangan dalam penelitian-penelitian terdahulu, penelitian ini memfokuskan pada bagaimana aktor non-pemerintah, yaitu Sabah Bridge dalam melakukan diplomasi pendidikan untuk memenuhi hak pendidikan anak PMI yang berada di Sabah, Malaysia.

## KERANGKA ANALISIS

### Diplomasi Pendidikan

Menurut Stephen McGlinchey (2017), diplomasi merupakan sebuah jalur komunikasi yang telah terorganisir, yang terjadi antara beberapa aktor yang telah memiliki tujuannya masing-masing, aktor-aktor ini adalah negara. Diplomasi juga bisa dikatakan sebagai kebijakan luar negeri apabila negara-negara yang saling terlibat tersebut memiliki sebuah *national interest*. Melalui diplomasi antarnegara dapat

berkomunikasi satu sama lainnya, dan sebaliknya jika diplomasi tidak ada atau tidak terjadi maka negara-negara tersebut dapat memunculkan perang. Oleh karena itu, diplomasi sangat dibutuhkan dan sangat penting dalam proses komunikasi antarnegara yang nantinya dapat mewujudkan tujuan dari negara-negara yang terlibat. Dengan adanya diplomasi juga dapat memunculkan perdamaian bagi negara-negara dan meminimalisir terjadinya konflik dan perang (McGlinchey, 2017).

Diplomasi menurut G.R Berridge (2010), adalah sebuah aktivitas politik dengan mengutamakan faktor sumber daya manusia yang baik. Tujuan dari diplomasi adalah pengamanan negara yang tidak menggunakan propaganda, hukum, maupun kekuatan dalam kebijakan luar negeri. Dapat dikatakan, bahwa diplomasi merupakan alat komunikasi untuk menawarkan kebijakan luar negeri suatu negara. Berridge juga memaparkan bahwa dalam diplomasi terdapat pelaku baru, yaitu organisasi non-pemerintah (*Non-Governmental Organization*) pada level internasional yang bersifat bebas. Fokus utama diplomasi, yaitu sebagai penyelesaian konflik (*resolution conflict*) saat terjadi perbedaan pendapat atau kepentingan tanpa menggunakan kekerasan atau peperangan. (Berridge, 2010).

Setiap negara memiliki cita-cita dan juga harapan untuk kemajuan negaranya. Berbagai upaya dilakukan negara untuk meraih cita-cita tersebut, salah satunya menggunakan diplomasi. Kegiatan diplomasi ini dapat dilakukan hanya dua negara saja atau juga bisa dilakukan dengan melibatkan beberapa negara. Diplomasi tidak hanya sebuah negara menjalin hubungan dengan negara lain, tetapi juga dapat dilakukan dengan organisasi internasional yang memiliki tujuan yang sama (Amin, 2018). Diplomasi dapat dilakukan secara informal dan mengedepankan *power* melalui lobi dan negosiasi. Melalui diplomasi, maka antar negara yang terlibat dapat saling bertukar informasi dan memberi pengaruh (Nye, 2008). Diplomasi yang lebih mementingkan pada kegiatan negosiasi atau tawar-menawar dibandingkan jalur peperangan. Biasanya kegiatan diplomasi dilakukan untuk menyelesaikan persoalan tanpa menggunakan perang untuk mencapai tujuan yang telah disepakati. Diplomasi juga mengupayakan keamanan yang tercipta karena adanya perbedaan antarnegara yang terlibat (Prayuda & Sundari, 2019). Menjalin hubungan dengan negara lain melalui diplomasi adalah sebuah strategi negosiasi untuk memperkenalkan potensi yang dimiliki

sebuah negara ke lingkungan internasional. Negara yang terlibat dalam kegiatan diplomasi dapat saling memberi dukungan dalam meningkatkan potensi dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi (R. A. Dewi & Santoso, 2022).

Diplomasi sangatlah beragam, salah satunya adalah diplomasi pendidikan. Dalam diplomasi pendidikan, lebih mengedepankan mengenai penanganan permasalahan pendidikan dan juga memberikan pengaruh pendidikan untuk memberi bantuan pada sebuah kelompok. Untuk melakukan diplomasi pendidikan, perlu adanya campur tangan dari beberapa pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda namun cara mengatasinya sama, yaitu melalui diplomasi pendidikan. Salah satu permasalahan yang dapat diselesaikan melalui diplomasi pendidikan adalah mengenai pendekatan yang terjadi antar aktor dengan latar belakang yang berbeda (CED, 2018). Konsep diplomasi pendidikan merupakan sebuah relasi dengan negara lain berupa kerjasama yang memiliki fokus pada bidang pendidikan. Dalam praktik pelaksanaannya, diplomasi pendidikan suatu keharusan untuk melakukan pendekatan antar negara tanpa adanya unsur paksaan satu sama lain (Arikarani et al., 2020).

Tujuan dari diplomasi pendidikan adalah untuk memperkenalkan sebuah kerjasama yang efisien di berbagai bidang untuk mengatasi permasalahan pendidikan dan juga mengupayakan pendidikan menjadi lebih maju (Ratnanggana et al., 2018). Pendidikan dinilai sangat berpengaruh dalam mengembangkan kemampuan yang dimiliki oleh setiap manusia. Dengan adanya pendidikan, maka setiap manusia dapat mengembangkan kemampuannya dan dapat meningkatkan keamanan baik bagi diri mereka sendiri maupun bagi lingkungan. Peningkatan keamanan manusia ini mendorong setiap negara dapat berkompetisi di ranah global yang semakin berkembang. Melalui pendidikan, negara mampu mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran karena adanya peningkatan kemampuan sumber daya manusia yang didapat dari pendidikan (Muhardi, 2004).

### **Aktor Diplomasi**

Dalam Hubungan Internasional, terdapat tingkatan analisis yang berfokus pada sistem internasional. Sistem internasional sendiri memiliki bagian yang meliputi, negara, individu, dan sistem. Sehingga sebuah analisis dapat dilakukan melalui tingkatan-tingkatan yang ada pada Hubungan Internasional. Pada tingkat negara

maka dapat mengamati bagaimana keadaan suatu negara dan interaksi yang dilakukan oleh negara. Tingkat grup atau kelompok, melihat sudut pandang dari sebuah kelompok. Kemudian tingkat individu merupakan tokoh-tokoh yang terlibat di ranah umum (Gebhard, 2018).

Diplomasi dalam perkembangannya telah semakin maju dalam melakukan hubungan internasional, yang dalam pelaksanaannya tidak hanya melibatkan negara atau pemerintah (*state actor*) sebagai aktor utama. Aktor non-pemerintah (*non-state actor* atau *non-governmental organization/NGO*) kerap juga dilibatkan untuk membahas hubungan atau isu internasional. Aktor non-pemerintah diperlukan untuk melakukan diplomasi secara lebih berkembang dengan mengikuti kemajuan teknologi dan informasi (Arikarani et al., 2020). Dengan demikian, aktor diplomasi terbagi menjadi dua aktor, yaitu pemerintah dan lembaga non-pemerintah. Kedua aktor ini memiliki tugas atau peranannya masing-masing.

Diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah mengupayakan adanya peningkatan kepercayaan antar negara, sehingga nantinya negara-negara dapat saling melakukan negosiasi, mediasi, intervensi, dan penyelesaian konflik. Pemerintah

merupakan kendaraan kekuasaan dalam mengembangkan sistem hubungan yang mendasari bangsa-bangsa. Sifat dari pemerintah sendiri terlalu kaku dan eksklusif, hal ini sering terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Meskipun demikian, pemerintah memiliki kemampuan dalam mengatur sumber daya dalam skala besar dan dapat memutuskan kebijakan dari yang sudah dipilih (Diamond & McDonald, 1996). Pemerintah mengandalkan Kementerian Luar Negeri untuk melaksanakan diplomasi. Diplomasi yang dilakukan biasanya untuk memanfaatkan setiap peluang yang ada, sehingga dapat mempublikasikan yang ada di negaranya. Melalui publikasi tersebut, pemerintah dapat mengajukan aktor non-pemerintah untuk melaksanakan diplomasi (Berridge, 2010).

Aktor non-pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat merupakan salah satu aktor dari hubungan internasional yang mempengaruhi proses negosiasi dalam level internasional (Alfadh, 2013). Aktor non-pemerintah merupakan aktivitas yang dilakukan secara informal dengan tujuannya untuk membantu menyelesaikan konflik melalui komunikasi, pemahaman, dan juga kolaborasi. Diskusi yang dilakukan non-pemerintah biasanya bebas tanpa adanya

aturan resmi yang mengikat. Dari kebebasan ini, permasalahan dapat dicari akarnya dan dapat mencari solusi terbaik. Aktor non-pemerintah sendiri terdiri dari afiliasi formal yang memilih kebebasan daripada afiliasi formal. Diplomasi yang dilakukan non-pemerintah, biasanya menempatkan diri sebagai mediator atau konsultan, diskusi kelompok, serta menjadi perantara pesan (Diamond & McDonald, 1996). Aktor non-pemerintah yang melaksanakan diplomasi merupakan sebuah peluang yang telah diciptakan oleh pemerintah. Selain itu, pemerintah menjadikan aktor non-pemerintah sebagai sekutu dalam pelaksanaan diplomasi baik dalam negeri maupun luar negeri (Berridge, 2010).

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam menjawab rumusan masalah adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Jenis penelitian deskriptif merupakan penelitian hasil penyelidikan suatu peristiwa yang berasal dari informasi seseorang atau suatu kelompok yang kemudian dipaparkan kembali oleh peneliti dalam bentuk deskripsi. Informasi yang diperoleh dapat berupa gambar atau kata yang dijabarkan oleh peneliti. Penelitian deskriptif menyajikan



data yang sesungguhnya tanpa adanya pengelolaan oleh pihak lain, tujuannya untuk memberikan representasi suatu peristiwa yang telah ada (Rusandi & Rusli, 2021).

Alasan penulis menggunakan metode penelitian kualitatif karena penelitian yang dilakukan ini lebih cenderung ke deskripsi, sehingga penulis akan lebih mampu memaparkan tentang diplomasi pendidikan dari *Sabah Bridge* dan pemerintahan untuk memenuhi hak pendidikan atas anak-anak PMI yang terdapat di Sabah, Malaysia.

Pada penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Data primer didapat dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis, dan untuk sumber data sekunder diambil dari jurnal, buku, dan *website* yang kredibel serta berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pendidikan Bagi Keluarga PMI di Sabah, Malaysia

Pendidikan merupakan sebuah wadah untuk mengembangkan dan membentuk potensi diri yang dimiliki oleh setiap orang. Komponen ada dalam pendidikan pun sangat beragam dan mencakup segala bidang untuk mengembangkan potensi dalam diri setiap orang. Dengan adanya pendidikan, maka pola pikir dan potensi yang dimiliki seseorang

dapat terbentuk. Pendidikan sangat berperan bagi kehidupan individu untuk membentuk karakter seseorang menjadi baik, sehingga pendidikan tidak memiliki batas-batas tertentu. Bahkan setiap orang berhak mendapatkan pendidikan dan tidak ada batasan usia dalam mendapatkan pendidikan baik secara formal maupun informal (Lubis, 2021). Pekerja migran Indonesia yang ada di Sabah, mayoritas memiliki pekerjaan sebagai buruh perkebunan kelapa sawit dan sebagian kecil hanya ibu rumah tangga. Asal PMI yang bekerja di perkebunan kelapa sawit mayoritas dari Kalimantan, Sulawesi khususnya di Toraja, dan NTB. PMI bekerja di perkebunan kelapa sawit yang dimiliki oleh perseorangan atau PT dan milik pemerintah Malaysia. Namun PMI yang ilegal yang terdapat di Sabah bekerja di perkebunan milik perseorangan. Untuk upah yang didapatkan merupakan hasil kesepakatan penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia dengan Kementerian Luar Negeri Malaysia. Upah yang didapat PMI berkisar 1.000 hingga 5.000 Ringgit Malaysia, jika dirupiahkan menjadi 3,5 juta hingga 5,3 juta per bulannya (CNBC Indonesia, 2022). Upah tersebut terbilang kecil dengan biaya harian di Malaysia dan juga pendidikan anak mereka



di sana. Sehingga banyak orang tua yang lebih meminta anaknya untuk bekerja sebagai buruh dan tidak melanjutkan pendidikan terutama bagi yang laki-laki, sedangkan untuk yang perempuan diminta untuk segera menikah daripada melanjutkan pendidikan. Lain dari itu, sebagian orang tua yang paham pentingnya pendidikan memilih untuk menyekolahkan anaknya atau meminta anak-anak mereka untuk mengikuti program beasiswa repatriasi walaupun mereka harus berpisah.

#### **Aktor yang Terlibat Dalam Diplomasi Pendidikan bagi anak TKI di Sabah**

Dalam pelaksanaan diplomasi pendidikan untuk pemenuhan hak anak pekerja migran Indonesia yang ada di Sabah Malaysia melibatkan aktor-aktor yang berperan penting. Aktor-aktor tersebut adalah pemerintah dan juga lembaga non-pemerintah.

Aktor pemerintah dalam melaksanakan diplomasi pendidikan ini adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud Indonesia dan Keimigrasian Malaysia. Adapun kerjasama lainnya dengan Setiausaha Kerajaan Negeri (SKN) di Sabah, Jabatan Imigresen Malaysia (JIM) di Sabah, Polis Diraja Malaysia (PDRM), dan Konsulat

RI di Tawau, serta perwakilan Republik Indonesia lainnya yang ada di Malaysia (Kemlu, 2022). Upaya yang diberikan Kemendikbud sebagai pemerintah Indonesia adalah membuat atau membangun sekolah di Malaysia dan mengirimkan tenaga pengajar untuk mengajar anak-anak pekerja migran Indonesia. Kemendikbud juga mengadakan kerjasama atau melakukan negosiasi dengan pihak Keimigrasian Malaysia untuk memberangkatkan anak-anak PMI ke Indonesia terutama bagi yang belum memiliki dokumen lengkap, sehingga perlu adanya negosiasi. Selain dengan sesama pemerintah, Kemendikbud juga menjalin kerjasama dengan sekolah-sekolah yang terdapat di Indonesia yang nantinya menjadi mitra untuk sekolah anak PMI. Upaya lain yang dilakukan pemerintah atau Kemendikbud, yaitu memberikan beasiswa bagi anak-anak PMI dan mengadakan kerjasama dengan sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Keterlibatan antar negara inilah yang menjadikan pemerintah ikut campur tangan untuk mengupayakan pendidikan bagi anak pekerja migran.

Aktor non-pemerintah dapat terlibat dalam kegiatan diplomasi untuk mendorong atau membuat negara lain tertarik dengan suatu negara (Saefudin, 2008). Diplomasi

pendidikan yang menangani masalah pendidikan juga dilakukan oleh aktor non-pemerintah, yaitu Sabah Bridge.

Sabah Bridge merupakan yayasan pendidikan yang telah diatur dalam badan hukum AHU-0004896.AH.01.04 Tahun 2020 dengan nama Yayasan Pendidikan Sabah Bridge. Yayasan pendidikan ini berfokus pada pemenuhan hak pendidikan anak-anak pekerja migran Indonesia yang terdapat di perkebunan kelapa sawit di Sabah, Malaysia.

Yayasan Pendidikan Sabah Bridge adalah salah satu wujud rasa kepedulian dari para guru yang diutus oleh Kemendikbud untuk mengajar di Sabah, Malaysia. Guru-guru tersebut menginisiasi untuk membentuk yayasan Sabah Bridge yang dibentuk pada tanggal 10 Desember 2014. Pendiri Sabah Bridge sendiri terdiri dari enam pendidik kontrak yang dikirimkan oleh Kemendikbud untuk memberikan pelayanan bagi anak-anak pekerja migran yang tidak mendapatkan pendidikan di sekolah Malaysia. Kantor pusat Sabah Bridge berada di Dusun Nglarangan Gang Sumbawa RT 003 RW 010, Desa Karang Sari, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Meskipun kantor pusat berada di Indonesia, Sabah Bridge sendiri pertama kali didirikan di

Sabah, Malaysia sehingga menggunakan nama "Sabah Bridge".

Latar belakang dari Sabah Bridge berfokus pada permasalahan pendidikan dan mengupayakan anak-anak pekerja migran dapat terus mengenyam pendidikan. Visi yang dimiliki oleh Sabah Bridge, yaitu "Memfasilitasi keberlanjutan pendidikan anak-anak pekerja migran Indonesia di Malaysia untuk melanjutkan pendidikannya di Indonesia, dan menyiapkannya menjadi generasi bangsa yang terdidik dan mandiri. Sedangkan misinya, yaitu: a) memfasilitasi anak-anak pekerja migran Indonesia di Malaysia untuk melanjutkan pendidikan di Indonesia; b) melakukan pengawasan dan pembinaan siswa repatriasi terutama siswa repatriasi sekolah mitra yayasan selama mengikuti pendidikan di Indonesia; c) bekerjasama dengan pihak terkait dalam upaya memperluas akses fasilitasi pendidikan anak-anak pekerja migran Indonesia di Malaysia; d) mengedukasi guru pendamping dan orang tua siswa tentang program repatriasi. Sabah Bridge ada karena rasa kepedulian terhadap anak pekerja migran supaya dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Nama Sabah Bridge menunjukkan bahwa yayasan ini sebagai jembatan/sarana untuk melanjutkan

mimpi-mimpi anak pekerja migran untuk bersekolah setinggi mungkin.

Dalam menjalankan diplomasi pendidikan yang dilakukan oleh Sabah Bridge, Sabah Bridge dibantu oleh beberapa pihak, yaitu aktor pemerintah, seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan aktor non-pemerintah (*Community Learning Center*) yang merupakan anak cabang dari Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK) (Kemlu, 2019), serta sekolah-sekolah di Indonesia. Selain itu adakah juga dengan pemerintah Malaysia.

### **Peran dan Pelaksanaan Diplomasi Pendidikan oleh Sabah Bridge**

Peran Sabah Bridge sebagai aktor non-pemerintah diperlukan dalam proses pemenuhan hak pendidikan anak-anak PMI. Sabah Bridge yang merupakan wujud kepedulian terhadap pendidikan anak, berperan dalam melakukan diplomasi dengan beberapa aktor. Dalam hal ini, Sabah Bridge melakukan diplomasi pendidikan antara lain dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, BP2MI Nunukan, dan sekolah-sekolah Indonesia yang dipilih sebagai mitra untuk penempatan anak-anak

PMI menimba ilmu di Indonesia. Tujuan dari diplomasi ini, yaitu untuk mendapatkan bantuan dari beberapa pihak dalam memenuhi hak pendidikan anak PMI atau repatriasi.

Diplomasi Sabah Bridge kepada pemerintah Indonesia menghasilkan sebuah dukungan dari pemerintah Indonesia dengan cara pemerintah Indonesia melakukan diplomasi ke pemerintah Malaysia untuk ikut campur tangan dalam proses pemenuhan hak pendidikan. Sehingga antara Sabah Bridge dengan pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia bersinergi dan menciptakan sebuah kesepakatan untuk memenuhi hak pendidikan anak PMI yang terdapat di Sabah dan sekitarnya.

Sabah Bridge melakukan diplomasi pendidikan dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan guna mendapatkan dorongan dalam pemenuhan hak pendidikan. Diplomasi ini menghasilkan *memorandum of understanding* (MoU) atau kesepakatan untuk memberikan beasiswa bagi anak atau siswa repatriasi yang terpilih. Siswa repatriasi yang mendapatkan beasiswa dikirimkan ke Indonesia dan ditempatkan di sekolah-sekolah yang telah menjalin kerjasama dengan Kemendikbud. Sekolah-sekolah yang menjadi mitra tersebar ke

sebelas provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat (NTB), Bali, dan Lampung. Kerjasama Kemendikbud dengan sekolah-sekolah merupakan program pemerintah dengan memberikan beasiswa untuk tingkat SMA. Beasiswa yang diberikan adalah pembiayaan atau dana untuk bersekolah di Indonesia. Bantuan beasiswa juga datang dari yayasan dari SIKK dan CLC juga memberikan bantuan beasiswa bagi sebagian anak (Kemlu, 2019).

Selain melibatkan Kemendikbud, Sabah Bridge juga melibatkan pemerintah Malaysia, yaitu berupa kepengurusan dokumen keimigrasian. Dokumen keimigrasian yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia merupakan syarat penyeberangan bagi anak-anak tersebut untuk kembali ke Indonesia. Dengan demikian, Sabah Bridge menjadi penghubung juga pada kantor perwakilan Indonesia yang terdapat di Malaysia.

### **Kerjasama Sabah Bridge untuk Memenuhi Hak Pendidikan Anak PMI di Sabah, Malaysia**

Sabah Bridge dalam memenuhi hak pendidikan anak-anak PMI tidak terlepas dari

beberapa bantuan dan dukungan dari pemerintah, baik pemerintah Indonesia maupun pemerintah Malaysia.

#### *Dukungan Pemerintah Indonesia*

Pemerintah Indonesia dalam mendukung Sabah Bridge untuk memenuhi hak pendidikan anak PMI, yaitu dengan bekerja sama dengan sekolah-sekolah yang tersebar di seluruh Indonesia untuk menjadi mitra dalam penerimaan anak PMI tersebut. Selain itu, pemerintah Indonesia juga memberi pendanaan atau pembiayaan bagi anak-anak tersebut selama bersekolah di Indonesia. Pemerintah yang menangani langsung adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan memberikan beasiswa yang disebut sebagai ADEM. ADEM sendiri merupakan singkatan dari Afirmasi Pendidikan Menengah. Jenis beasiswa yang diberikan beragam, antara lain beasiswa repatriasi ADEM, beasiswa Papua-Papua Barat, dan beasiswa yayasan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan memberikan beasiswa repatriasi ADEM bagi yang melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Atas. Kemudian dari jenjang SMA di Indonesia, anak-anak PMI akan mengikuti tes masuk ke perguruan tinggi yang menjadi mitra Kemendikbud dan Sabah Bridge. Beasiswa pada jenjang perguruan

tinggi disebut ADIK, yaitu Afirmasi Pendidikan Tinggi.

Menurut literasi dari internal Sabah Bridge terdapat jumlah siswa yang mendapatkan beasiswa repatriasi atau beasiswa yang diberikan pemerintah Indonesia untuk melanjutkan pendidikan di Indonesia.

**Tabel 1. Jumlah Penerima Beasiswa Repatriasi**

Tahun	Jumlah Penerima Beasiswa Repatriasi
2015-2016	28 Siswa
2017-2018	262 Siswa
2019-2020	650 Siswa
2021-2022	455 Siswa

Sumber: (Nugroho, 2022)

Fasilitas atau penerimaan beasiswa tersebut diawali pada tahun 2015 dan yang dikirimkan sebanyak 28 siswa. Kemudian pada tahun-tahun berikutnya jumlah siswa tersebut semakin bertambah, bahkan peningkatan jumlahnya pun sangat signifikan. Siswa-siswi tersebut disebar di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Tahun 2019, para siswa yang mendapat beasiswa repatriasi disalurkan ke enam puluh lima sekolah dari 11 provinsi yang ada di

Indonesia, data dapat dilihat pada Table 1. Jumlah Penerima Beasiswa Repatriasi. Mayoritas siswa yang lolos beasiswa repatriasi merupakan lulusan dari SMP CLC (*Community Learning Center*) yang terdapat di Kota Sabah, Kota Sarawak, Kota Johor Bahru dan sebagian lulusan dari SIKK (Sekolah Indonesia Kota Kinabalu) (Kemlu, 2019).

**Table 2. Kuota Pemerintah Penerima Beasiswa Repatriasi**

Tahun	Kuota Pemerintah
2017	100 siswa
2018	250 siswa
2019-2020	500 siswa
2021-2022	700 siswa

Sumber: (Nugroho, 2022)

Kerjasama atau pemberian beasiswa kepada anak PMI yang terdapat di Malaysia adalah bentuk kepedulian pemerintah Indonesia terhadap pendidikan yang harus diterima anak-anak PMI sebagai warga negara Indonesia. Menurut data pada Table 2. Kuota Pemerintah Penerima Beasiswa Repatriasi dari awal tahun penyaluran hingga tahun 2022 ini, kuota yang diberikan pemerintah Indonesia pun semakin

meningkat. Diharapkan juga para penerima beasiswa dapat memanfaatkan peluang yang telah diberikan pemerintah Indonesia kepada mereka. Dengan mendapatkan pendidikan yang layak dan baik, maka dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia (Kemlu, 2019). Selain itu, dengan adanya pendidikan, pemerintah Indonesia juga mendapatkan hal positif dengan adanya program tersebut, yakni pendidikan bagi warga negara Indonesia dapat tersalurkan dan dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik untuk Indonesia.

#### *Kerjasama dengan Pemerintah Malaysia*

Kerjasama yang dilakukan pemerintah Indonesia dengan pemerintah Malaysia dalam menangani permasalahan PMI telah dilaksanakan dari tahun 2006 yang telah tertulis dalam kesepakatan atau MoU. MoU yang disepakati menghasilkan perlindungan yang didapat bagi PMI termasuk anak-anaknya yang ada di Malaysia. Perlindungan anak-anak PMI yang dimaksud berupa fasilitas pendidikan yang perlu diberikan kepada anak-anak PMI (Hartati & Andawiyah, 2020). Fasilitas pendidikan yang sesuai dengan kesepakatan MoU adalah pendirian SIKK (Sekolah Indonesia Kota Kinabalu) yang membawahi CLC yang tersebar di beberapa kota di Malaysia

(Muyamin, 2019). Program beasiswa repatriasi ini didapat dari Setiausaha Kerajaan Negeri (SKN) di Sabah, Jabatan Imigrasi Malaysia di Sabah (JIM), Polis Diraja Malaysia (PDRM) (Kemlu, 2022).

Kerjasama dengan pihak keimigrasian Malaysia, berupa kepengurusan dokumen anak-anak PMI sebagai syarat penyeberangan untuk kembali ke Indonesia. Dalam hal ini, Sabah Bridge berperan dalam menghubungkan antara kantor perwakilan Indonesia yang ada di Malaysia dengan pihak keimigrasian Malaysia. Kemendikbud akan menghubungi kantor perwakilan Indonesia yang ada di Malaysia dan memberitahukan mengenai program pemerintah tersebut, sehingga perlu adanya penyeberangan dari Malaysia ke Indonesia. Perwakilan Indonesia tersebut kemudian akan melakukan diplomasi pendidikan dengan pemerintah Malaysia, salah satunya Keimigrasian Malaysia untuk melakukan pemberangkatan atau penyeberangan bagi anak PMI. Kendala yang dihadapi biasanya kurangnya dokumen saat penyeberangan, namun sebelumnya perwakilan Indonesia akan berunding mengenai pemberangkatan yang belum memiliki dokumen lengkap supaya seluruh anak, baik yang sudah memiliki dokumen lengkap atau yang belum memiliki dokumen

lengkap dapat menyeberang menuju Indonesia.

## SIMPULAN

Peran aktor non-negara dalam mendukung tugas pemerintahnya untuk memenuhi kepentingan nasional di luar negeri melalui diplomasi terkonfirmasi dalam kasus diplomasi pendidikan Sabah Bridge dalam memenuhi hak pendidikan bagi anak pekerja migran Indonesia (PMI) di Sabah, Malaysia.

Kesulitan anak-anak PMI di Sabah Malaysia mengakses pendidikan di sekolah Malaysia menimbulkan kepedulian Sabah Bridge untuk membantu memenuhi hak pendidikan yang seharusnya didapat mereka. Untuk itu, Sabah Bridge bergerak melakukan diplomasi pendidikan kepada beberapa pihak yang terkait, dan berperan sebagai jembatan di antara mereka.

Berkat diplomasi Sabah Bridge kepada pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia melakukan diplomasi pendidikan dengan pemerintah Malaysia dan menghasilkan beberapa kerjasama. Antara lain: membangun Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK) dan mengirimkan tenaga pengajar untuk memberikan akses pendidikan bagi anak PMI; dan kerjasama

keimigrasian antara dua negara untuk memfasilitasi dokumen perjalanan dan kependudukan bagi anak PMI di Sabah. Selain itu, Sabah Bridge bersama Pemerintah Indonesia memberi bantuan berupa beasiswa repatriasi untuk memberi kesempatan anak-anak PMI di Sabah Malaysia dapat kembali ke Indonesia dan melanjutkan pendidikan di Indonesia.

## REFERENSI

- Alfadh, M. F. (2013). NGO Diplomacy: Peran Organisasi Non-Pemerintah dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Pekerja Migran di Malaysia. *Jurnal Interdependence*, 1(2), 101–116.
- Amin, A. A. W. (2018). *Diplomasi Publik Indonesia Melalui Bidang Pendidikan Dalam Hubungan Bilateral Indonesia-Thailand; Studi Kasus Mahasiswa* [Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta]. [https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42803/2/Aqil Aulia Wafda Amin-Fisip.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42803/2/Aqil%20Aulia%20Wafda%20Amin-Fisip.pdf)
- Arikarani, Y., Amirudin, M. F., & Ertati. (2020). Institusi Pendidikan Islam Sebagai Media Diplomasi Antar Bangsa. *Prodising ISID*, 1(1), 257–268. <https://jurnal.staibsllg.ac.id/index.php/prosidingisid/article/view/194>
- Berridge, G. (2010). Diplomacy: theory and practice. In *Choice Reviews Online*



- (Fourth, Vol. 49, Issue 01). Palgrave Macmillan.  
<https://doi.org/10.5860/choice.49-0522>
- CED. (2018). *What is Education Diplomacy?* Center for Education Diplomacy. <http://www.educationdiplomacy.org/what-is>
- CNBC Indonesia. (2022). *Malaysia Ogah Naikkan Gaji Minimum TKI Jadi Rp 5 Juta*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20220414125310-33-331700/malaysia-ogah-naikkan-gaji-minimum-tki-jadi-rp-5-juta>
- Dewi, R. A., & Santoso, R. B. (2022). Diplomasi Ekonomi Indonesia Terhadap Korea Selatan Dalam Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (Ik-Cepa). *Indonesian Journal of International Relations*, 6(2), 343–363. <https://doi.org/10.32787/ijir.v6i2.386>
- Dewi, U. N. M. (2018). Kebijakan KJRI Johor Bahru Dalam Mengatasi Permasalahan Pelayanan Pendidikan Bagi Anak-Anak Pekerja Migran Indonesia. In M. H. Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M. S. Prof. Dr. Achmad Nurmandi, D. S. Shobron, & D. M. N. Yamin (Eds.), *Prosiding Konferensi Nasional Ke-7 Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisiyyah (APPPTMA). Jilid 2. Sosial Politik dan Ekonomi* (Issue Ekonomi dan Sosial Politik, pp. 209–220). PPS UMY. <http://asosiasipascaptm.or.id/index.php/publikasi/konferensi-appptm-ke-7-meningkatkan-kualitas-dan-kuantitas-jurnal-ilmiah>
- Diamond, L., & McDonald, J. (1996). *Multi-Track Diplomacy: A Systems Approach to Peace* (L. Berlian (ed.); 3rd ed.). Kumarian Press.
- Evendi, Y., & Haryanto, A. (2021). Peran Aktor Individu Non-Pemerintah Dalam Diplomasi Stakeholders: Studi Kasus Aktivis Lingkungan Greta Thunberg Tahun 2018-2019. *Unwahas*, 5(3), 248–253. [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiAiIz4t638AhVHcGwGHRYuB\\_kQFnoECA0QAQ&url=https%3A%2F%2Fpublikasiilmiah.unwahas.ac.id%2Findex.php%2FSENASPOLHI%2Farticle%2Fview%2F5649&usg=AOvVaw18oZ9Trs7mS0gBljqyN-s](https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiAiIz4t638AhVHcGwGHRYuB_kQFnoECA0QAQ&url=https%3A%2F%2Fpublikasiilmiah.unwahas.ac.id%2Findex.php%2FSENASPOLHI%2Farticle%2Fview%2F5649&usg=AOvVaw18oZ9Trs7mS0gBljqyN-s)
- FT UGM. (2020). *Aris Prima: Jembatan Sabah dan besarnya*. Universitas Gajah Mada. <https://ft.ugm.ac.id/aris-prima-sabah-bridge-dan-impian-besarnya/>
- Gebhard, C. (2018). *Levels of analysis*. E-International Relations. <https://doi.org/10.4324/9781315745572-6>
- Hartati, A. Y., & Andawiyah, R. (2020). Diplomasi Indonesia Dalam Menangani Masalah Pendidikan Anak TKI Di Sabah Malaysia. *SPEKTRUM; Jurnal Ilmu Politik Hubungan Internasional*, 17(2), 1–23. <https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/SPEKTRUM/article/view/4358/3430>

- Kemlu. (2019). *Terima Beasiswa Repatriasi, Ratusan Anak PMI Lanjutkan Pendidikan di Indonesia*. Kementerian Luar Negeri. <https://kemlu.go.id/kotakinabalu/id/news/1607/terima-beasiswa-repatriasi-ratusan-anak-pmi-lanjutkan-pendidikan-di-indonesia>
- Kemlu. (2022). *265 Anak PMI Penerima Beasiswa Repatriasi Pendidikan Diberangkatkan ke Indonesia*. Kementerian Luar Negeri. <https://kemlu.go.id/kotakinabalu/id/news/18113/265-anak-pmi-penerima-beasiswa-repatriasi-pendidikan-diberangkatkan-ke-indonesia>
- Lubis, R. N. (2021). *Konsep Dasar Tentang Pengertian Pendidikan*. Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan. <https://ayoguruberbagi.kemdikbud.go.id/artikel/pengertian-pendidikan/>
- Margono. (2015). Aktor Non-Negara Dalam Hubungan Internasional. *Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 28(2), 105–110. <http://journal.um.ac.id/index.php/jppk/article/view/5450/2119>
- Martauli, S. (2015). Peran diplomasi sebagai cara meningkatkan Pengakuan internasional terhadap posisi suatu Negara dalam mengimplementasikan kebijakan politik luar negeri (Studi kasus di Indonesia). *Jurnal Good Governance*, 11(1), 63–80. <https://doi.org/10.32834/gg.v13i1.30>
- McGlinchey, S. (2017). *Diplomacy*. *E-International Relations*, 1961, 1–8. <https://www.e-ir.info/2017/01/08/diplomacy/>
- STEPHEN
- Muhardi. (2004). Kontribusi Pendidikan Dalam Meningkatkan Kualitas Bangsa Indonesia. *Media Neliti*, 20(4), 478–492. <https://media.neliti.com/media/publications/156226-ID-kontribusi-pendidikan-dalam-meningkatkan.pdf>
- Muyamin, M. (2019). Peran Aktif NGO Humana dalam Memfasilitasi Pendidikan Anak-Anak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Sabah Malaysia. *Indonesian Perspective*, 4(2), 100–117. <https://doi.org/10.14710/ip.v4i2.26703>
- Nugroho, A. (2022). *Interview dengan Ketua Yayasan Sabah Bridge*.
- Nye, J. S. (2008). Public diplomacy and soft power. *Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 616(1), 94–109. <https://doi.org/10.1177/0002716207311699>
- Prayuda, R., & Sundari, R. (2019). Diplomasi Dan Power: Sebuah Kajian Analisis. *Journal of Diplomacy and International Studies*, 2(1), 80–93. <https://doi.org/10.30596/edutech.v5i2.3268>
- Ratnanggana, P. D. R., Sushanti, S., & Resen, P. T. K. (2018). Representasi Diplomasi Publik Indonesia melalui Cultural Exchange sebagai Sarana Kerjasama Budaya di Korea Selatan.

- OJS Unud*, 1–11.  
<https://journal.uir.ac.id/index.php/jdis/article/view/4429>
- Rusandi, & Rusli, M. (2021). Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus. *Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 2(1), 48–60.  
<https://doi.org/10.55623/au.v2i1.18>
- Saefudin, H. A. (2008). dalam Membangun Citra Indonesia : Studi Kegiatan “ Koalisi untuk Kebebasan Informasi .” *MediaTor E-Jurnal Unisba*, 9(1), 77–88.  
<https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mediator/article/download/1137/703>
- Safitri, A. O., Yuniarti, V. D., & Rostika, D. (2022). Upaya Peningkatan Pendidikan Berkualitas di Indonesia: Analisis Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). *Jurnal Basicedu*, 6(4), 7096–7106.  
<https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i4.3296>
- Sholina, C. A. (2022). Pemenuhan Hak-Hak Asasi Anak Tenaga Kerja Indonesia Di Perkebunan Sawit Di Wilayah Tawau, Sabah, Malaysia. *Jurnal Pembangunan Manusia*, 3(1), 1--20.  
<https://doi.org/10.7454/jpm.v3i1.1029>
- Soesilowati, S. (2017). Diplomasi Soft Power Indonesia melalui Atase Pendidikan dan Kebudayaan. *Jurnal Global & Strategis*, 9(2), 293–308.  
<https://doi.org/10.20473/jgs.9.2.2015.293-308>
- Sujatmoko, E. (2010). Hak Warga Negara Dalam Memperoleh Pendidikan. *Jurnal Konstitusi*, 7(1), 181–212.  
<https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/208/204>
- Suwarno, D. ., Suryono, Y., & Zamroni. (2021). Equalization Access to Education as an Effort to Foster the Nationalism of Indonesian Migrant Workers’ Children in Border Areas. *European Journal of Educational Research*, 10(3), 1825–1837.  
<https://www.eu-jer.com/%0D>
- UGM, A. (2020). *Aris Prima, S.T.* Alumni Universitas Gajah Mada.  
<https://alumni.ugm.ac.id/2020/11/08/ar-is-prima-s-t/>
- Zamzami, F. W., & Ahdiat, C. A. (2020). Peran Indonesia Youth Foundation dalam Mendukung Diplomasi Publik Indonesia (2020-2021). *Jurnal Ilmiah Widya Sosiopolitika*, 5(3), 1–17.  
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/widya/article/download/77134/45155>